



Politik Tubuh Perempuan Antara Kontrol Sosial dan Resistensi

Ni Luh Manik Esa Swastini

Tedi Erviantono

Piers Andreas Noak

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Correspondence: manikesaswastini@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas politik tubuh perempuan dalam konteks sosial, budaya, agama, dan media di Indonesia. Tubuh perempuan tidak hanya dipahami sebagai entitas biologis, tetapi juga sebagai medan kekuasaan yang dikontrol oleh berbagai institusi seperti negara, agama, adat, dan media. Melalui pendekatan literature review, artikel ini mengungkap bagaimana tubuh perempuan menjadi objek regulasi moral dan simbolik, namun juga menjadi ruang resistensi dan ekspresi politik. Perempuan menunjukkan agensi melalui media sosial, seni, dan reinterpretasi teks keagamaan. Pendekatan ekofeminisme turut memperluas pemahaman dengan mengaitkan eksploitasi tubuh perempuan dan alam dalam sistem kapitalisme patriarkal. Artikel ini menegaskan pentingnya melihat tubuh perempuan sebagai subjek politik yang aktif dalam perjuangan menuju keadilan gender.

Kata Kunci: politik tubuh, perempuan, kontrol sosial, resistensi, media, ekofeminisme

Abstract

This article explores the politics of women's bodies within Indonesia's social, cultural, religious, and media contexts. Women's bodies are not merely biological entities but sites of power regulated by institutions such as the state, religion, tradition, and media. Using a literature review approach, this study reveals how women's bodies are subjected to moral and symbolic regulation, yet also serve as spaces of resistance and political expression. Women assert agency through social media, art, and reinterpretation of religious texts. The ecofeminist perspective further expands the analysis by linking the exploitation of women's bodies and nature under patriarchal capitalism. This article emphasizes the importance of recognizing women's bodies as active political subjects in the struggle for gender justice.

Keywords: body politics, women, social control, resistance, media, ecofeminism

I. Pendahuluan

Tubuh perempuan telah lama menjadi objek politisasi dan pengawasan dalam berbagai struktur sosial dan budaya. Di Indonesia, tubuh perempuan tidak sekadar dipahami sebagai entitas biologis, tetapi juga sebagai simbol politik, moral, dan spiritual yang dipenuhi dengan makna-makna ideologis (Susilo & Kodir, 2023). Tubuh perempuan menjadi medan artikulasi berbagai kekuasaan, mulai dari negara, agama, hingga media. Dalam situasi ini, perempuan menghadapi serangkaian kontrol sosial yang mengekang otonomi mereka atas tubuh sendiri, tetapi juga menumbuhkan berbagai bentuk resistensi. Maka dari itu, pembahasan mengenai politik tubuh

perempuan menjadi sangat penting untuk mengungkap dinamika relasi kuasa yang tidak kasat mata namun berpengaruh signifikan terhadap konstruksi sosial perempuan.

Michel Foucault (1977) telah menegaskan bahwa tubuh adalah locus utama dari kekuasaan. Kekuasaan bekerja tidak hanya dalam bentuk represi yang kasat mata, melainkan juga melalui pengawasan internal, disiplin, dan pembentukan subjek. Konsep ini menjelaskan bagaimana tubuh perempuan diatur dan diinspeksi secara sosial. Dalam masyarakat patriarkal, pengawasan terhadap tubuh perempuan dilakukan melalui pembakuan norma-norma moral dan nilai-nilai budaya yang dilegitimasi oleh agama dan negara. Sebagai contoh, praktik tes keperawanan yang diterapkan pada calon anggota polisi perempuan di Indonesia mencerminkan bentuk kontrol biopolitik atas tubuh (Zulfa, 2019). Praktik ini tidak hanya menyinggung hak atas privasi, tetapi juga merupakan simbol intervensi negara terhadap moralitas perempuan.

Dalam dimensi religius, pembatasan terhadap tubuh perempuan sering dikaitkan dengan teks-teks agama yang ditafsirkan secara patriarkal. Penelitian yang dilakukan oleh Fatonah (2022) menunjukkan bagaimana peran perempuan dalam praktik keagamaan sering dibatasi oleh konstruksi tubuh yang dipandang sebagai sumber fitnah. Tubuh perempuan dilihat sebagai pemicu syahwat yang harus ditutup, dikendalikan, dan dijaga agar tidak menimbulkan “kerusakan sosial”. Interpretasi semacam ini menjadikan tubuh perempuan sebagai entitas pasif yang perlu dikendalikan, alih-alih sebagai subjek aktif yang berdaulat atas dirinya.

Kontrol terhadap tubuh perempuan tidak hanya terjadi di ruang keagamaan dan birokrasi, tetapi juga dalam industri media. Representasi tubuh perempuan dalam sinetron dan iklan televisi kerap kali terjebak dalam pola objectification dan stereotip gender (Paramita, 2017). Perempuan digambarkan sebagai makhluk emosional, lemah, atau sebaliknya—hiperseksual—yang dirancang untuk memuaskan pandangan laki-laki (male gaze). Media tidak sekadar merepresentasikan kenyataan, tetapi juga membentuknya, menjadikan tubuh perempuan sebagai komoditas konsumsi visual yang menguntungkan kapitalisme patriarkal (Ningsih, 2022).

Dalam bidang lain, studi dari Rahmah (2020) dan menunjukkan bahwa perempuan kerap menjadi sasaran politik moral di ruang publik. Peraturan-peraturan yang mengatur cara berpakaian perempuan, termasuk kewajiban memakai jilbab di beberapa daerah, memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan dijadikan ukuran kesalehan dan martabat publik. Alih-alih memberikan kebebasan dalam menentukan identitas diri, perempuan dipaksa menyesuaikan diri dengan standar kesopanan yang ditetapkan oleh negara atau komunitas mayoritas.

Namun demikian, perempuan bukanlah entitas pasif yang hanya tunduk pada kontrol. Banyak perempuan yang justru melakukan resistensi melalui negosiasi identitas dan otonomi tubuh. Dalam kajian oleh Azizah (2021), media sosial menjadi ruang baru bagi perempuan muda untuk mengekspresikan agensi atas tubuh mereka melalui narasi self-love, body positivity, dan kritik terhadap standar kecantikan. Fenomena ini menandai pergeseran penting dalam pemaknaan tubuh, di mana perempuan merebut kembali otoritas atas citra tubuhnya dan menolak narasi dominan yang membatasinya.

Selain itu, bentuk resistensi juga muncul dalam seni dan budaya populer. Seniman perempuan, misalnya, menggunakan tubuh sebagai medium kritik sosial atas kontrol yang mereka alami. Seperti dicatat dalam artikel Jurnal Humaniora (Kusumawati, 2013), seni pertunjukan tubuh (body performance) dipakai untuk menyuarakan ketidakadilan gender dan menunjukkan bahwa tubuh perempuan bukan objek pasif, melainkan medium perjuangan politik. Hal ini

memperlihatkan bahwa tubuh bisa menjadi arena ekspresi politik, bukan semata-mata objek yang dikontrol.

Politik tubuh perempuan, dengan demikian, merupakan medan yang kompleks antara kuasa dan resistensi. Kekuasaan bekerja melalui lembaga-lembaga formal seperti negara dan agama, maupun lewat norma-norma informal dalam budaya sehari-hari. Tubuh perempuan dikontrol, diawasi, dan diatur—baik dalam urusan reproduksi, cara berpakaian, hingga cara berbicara dan bergerak. Namun, perempuan juga memiliki kapasitas untuk melawan dan menegosiasikan ruang-ruang kebebasannya. Di sinilah resistensi menjadi penting: bukan sebagai bentuk perlawanan frontal semata, tetapi juga dalam bentuk subversi, ironi, dan pengolahan makna.

Pendekatan ekofeminisme juga memperluas pemahaman politik tubuh perempuan dalam kaitannya dengan relasi alam dan kapitalisme. Dalam artikel oleh Susilo & Kodir (2023), eksploitasi terhadap tubuh perempuan disejajarkan dengan eksploitasi terhadap bumi dan alam. Kedua entitas tersebut diposisikan sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus, dilemahkan, dan dieksploitasi untuk keuntungan sistem dominan. Ekofeminisme melihat bahwa sistem patriarkal dan kapitalistik berperan dalam membentuk kontrol terhadap tubuh perempuan dan eksploitasi alam secara simultan.

Lebih jauh, studi dari UNRAM (2023) mengenai pengalaman perempuan-perempuan marginal di Nusa Tenggara Barat juga menggarisbawahi bagaimana tubuh perempuan dijadikan sasaran regulasi dan stigma dalam masyarakat adat. Perempuan yang melanggar norma adat tidak hanya dikucilkan secara sosial, tetapi juga sering mengalami kekerasan simbolik maupun fisik. Namun, mereka juga melahirkan bentuk-bentuk resistensi lokal, seperti pembentukan komunitas solidaritas, pelatihan kesadaran gender, hingga pengorganisasian perempuan berbasis desa.

Dengan menelaah berbagai temuan ini, dapat disimpulkan bahwa politik tubuh perempuan mencerminkan pertarungan terus-menerus antara kekuasaan dan kebebasan. Tubuh perempuan bukan hanya objek dominasi, melainkan juga situs perjuangan identitas dan martabat. Untuk itu, penting bagi akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan untuk mengkaji ulang kebijakan, wacana, serta praktik sosial yang berkaitan dengan tubuh perempuan. Mengangkat tubuh perempuan sebagai subjek politik yang aktif akan membuka jalan menuju keadilan gender yang lebih substansial.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Literature Review untuk mengkaji secara mendalam wacana mengenai *politik tubuh perempuan*, khususnya dalam hubungan antara kontrol sosial dan resistensi perempuan di Indonesia. Metode ini dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis secara sistematis hasil-hasil penelitian terdahulu guna membangun pemahaman yang komprehensif dan terstruktur mengenai topik yang diteliti (Snyder, 2019).

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada penelusuran literatur akademik berupa artikel jurnal, skripsi, tesis, buku, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik. Sumber-sumber yang dikaji diperoleh dari berbagai basis data daring, baik nasional maupun internasional, seperti Google Scholar, Garuda, Sinta, DOAJ, Academia.edu, dan berbagai repository universitas. Secara khusus, 30 dokumen dipilih berdasarkan relevansi tematik

terhadap isu politik tubuh perempuan, mencakup dimensi kontrol sosial, dominasi ideologis, serta praktik dan narasi resistensi.

Proses pencarian data dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti: *politik tubuh perempuan, kontrol sosial perempuan, gender dan tubuh, resistensi perempuan, dan representasi tubuh dalam media*. Artikel-artikel yang ditemukan kemudian diorganisasikan dan dianalisis secara sistematis menggunakan PRISMA flowchart (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) sebagai panduan seleksi dan pelaporan (Moher et al., 2009).

III. Pembahasan

1. Tubuh Perempuan Sebagai Lokus Kekuasaan

Tubuh perempuan, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kajian literatur yang dianalisis dalam penelitian ini, bukanlah entitas biologis semata, melainkan sebuah konstruksi sosial dan politik yang senantiasa menjadi lokus perebutan kekuasaan. Dalam ranah teoritik, gagasan Michel Foucault tentang *biopolitik* sangat relevan untuk membedah bagaimana tubuh dijadikan target kontrol oleh berbagai institusi kekuasaan. Foucault menyatakan bahwa kekuasaan modern tidak lagi beroperasi secara represif dengan kekerasan fisik semata, melainkan melalui regulasi tubuh dan kehidupan—*make live and let die*. Tubuh perempuan menjadi titik strategis dari operasi kekuasaan semacam ini karena ia berkaitan erat dengan seksualitas, reproduksi, moralitas, dan representasi simbolik atas kehormatan sosial. Dalam konteks ini, tubuh perempuan diposisikan bukan sebagai milik individu semata, melainkan sebagai milik masyarakat, negara, bahkan agama, yang berarti ia harus “dijaga”, “dikendalikan”, dan “dimanfaatkan” sesuai dengan logika institusional yang dominan.

Dalam konteks Indonesia, intervensi terhadap tubuh perempuan banyak ditemukan dalam kebijakan sosial dan institusional yang mengklaim melindungi martabat perempuan namun pada kenyataannya mereproduksi subordinasi. Salah satu contoh paling nyata adalah praktik tes keperawanan terhadap calon aparatur sipil negara atau anggota kepolisian, seperti yang dikaji dalam penelitian Zulfa (2019). Kebijakan ini mencerminkan bagaimana negara menyandarkan kelayakan publik seorang perempuan pada kondisi biologis yang tidak relevan dengan kompetensi atau integritas kerja. Tubuh perempuan dalam hal ini bukan hanya diawasi, tetapi juga distandarisasi sesuai dengan norma patriarkal yang melekat pada institusi negara. Selain itu, regulasi berpakaian yang diberlakukan di sejumlah daerah juga memperlihatkan kecenderungan negara untuk mengambil alih otoritas tubuh perempuan. Tubuh perempuan menjadi medan untuk menegakkan moralitas publik, yang sering kali tidak berlaku seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Selain negara, kekuasaan atas tubuh perempuan juga dijalankan oleh masyarakat melalui norma sosial dan tekanan budaya. Dalam banyak kasus, perempuan dianggap sebagai representasi moral keluarga dan komunitas. Ketika seorang perempuan dinilai “tidak layak” dalam berpakaian, berjalan sendirian malam hari, atau menunjukkan ekspresi seksual secara terbuka, maka ia tidak hanya dianggap melanggar norma, tetapi juga mencemari kehormatan kolektif. Temuan dari jurnal Resiprokal dan SALINGKA menunjukkan bahwa masyarakat sering kali menggunakan narasi agama atau adat untuk memperkuat kontrol terhadap tubuh perempuan, sehingga pelanggaran terhadap norma yang berkaitan dengan tubuh perempuan dapat berujung pada eksklusi sosial, kekerasan simbolik, bahkan kekerasan fisik. Dalam kondisi semacam ini,

perempuan tidak hanya kehilangan otoritas atas tubuhnya sendiri, tetapi juga dijadikan objek penilaian, pengawasan, dan sanksi dari berbagai arah.

Kekuasaan atas tubuh perempuan juga berjalan dalam jalur yang lebih halus dan simbolik, yakni melalui wacana dan representasi yang dibentuk oleh media. Tubuh perempuan diproduksi ulang melalui iklan, sinetron, media sosial, dan industri kecantikan dengan standar-standar ideal tertentu: putih, langsing, tinggi, muda, dan feminin. Representasi ini menciptakan “tubuh normatif” yang kemudian menjadi ukuran sosial. Perempuan yang tidak sesuai dengan standar tersebut dianggap kurang menarik, tidak sukses, bahkan gagal menjadi perempuan sejati. Ini merupakan bentuk kekuasaan kultural yang memaksa perempuan untuk menginternalisasi norma-norma tubuh ideal tanpa menyadari bahwa mereka sedang menjalankan skema penjinakan tubuh yang sangat dalam. Dalam hal ini, kontrol sosial tidak selalu hadir dalam bentuk larangan atau sanksi, tetapi juga melalui insentif simbolik dan penghargaan sosial terhadap tubuh-tubuh yang “patuh” terhadap standar dominan.

Dengan demikian, tubuh perempuan bukanlah ruang netral, melainkan terjebak dalam jaringan kuasa yang kompleks. Ia dikonstruksi, dipantau, diatur, dan dinilai oleh berbagai institusi mulai dari keluarga, masyarakat, negara, hingga media. Tubuh menjadi arena tarik menarik antara kontrol dan kebebasan, antara kepatuhan dan resistensi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pilihan perempuan untuk berpakaian, berjalan, beraktivitas di ruang publik, atau mengekspresikan keinginan tubuhnya selalu dibayangi oleh kemungkinan penghakiman sosial. Maka dari itu, tubuh perempuan tidak bisa hanya dipahami sebagai tubuh biologis, tetapi sebagai medan pertempuran sosial yang penuh dengan dimensi politik, moral, dan simbolik.

2. Agama dan Moralitas: Disiplin Tubuh dan Pembentukan Subjek

Tubuh perempuan dalam konteks keagamaan kerap kali menjadi simbol moralitas dan kesucian yang harus dijaga dengan penuh ketat, baik oleh individu maupun komunitas tempat ia hidup. Dalam masyarakat yang menjadikan agama sebagai dasar struktur sosial dan nilai, tubuh perempuan tidak hanya dipahami secara biologis, tetapi juga sebagai entitas spiritual yang memuat beban moral kolektif. Dalam konteks ini, agama bukan hanya membimbing spiritualitas individu, tetapi juga bertindak sebagai kekuatan normatif yang mendisiplinkan tubuh melalui aturan berpakaian, pengaturan pergaulan, pengawasan ekspresi gender, hingga cara perempuan berjalan atau berbicara di ruang publik.

Konsep *disciplinary power* dari Michel Foucault (1977) menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja tidak hanya dari atas ke bawah secara koersif, tetapi juga melalui pembentukan subjek yang patuh melalui mekanisme pengawasan, internalisasi norma, dan produksi rasa bersalah. Dalam masyarakat beragama, kekuasaan ini kerap dijalankan melalui ajaran, dakwah, institusi pendidikan, hingga tekanan sosial yang dibingkai sebagai “nasihat” atau “amar ma’ruf nahi munkar”. Dengan demikian, tubuh perempuan secara perlahan dibentuk untuk tunduk pada struktur normatif yang dianggap sebagai kehendak Ilahi—padahal sebenarnya itu adalah produk tafsir sosial yang historis dan kontekstual.

Penelitian Fatonah (2022) menunjukkan bagaimana tubuh perempuan dalam konteks pesantren di Jawa diposisikan sebagai fitnah yang harus ditutupi. Kerudung bukan hanya simbol keimanan, tetapi juga menjadi alat kontrol yang meregulasi kehadiran perempuan di ruang publik. Hal serupa ditemukan dalam skripsi Nabila (2023) yang menganalisis regulasi berpakaian mahasiswa di institusi Islam. Tubuh perempuan, dalam hal ini, tidak memiliki ruang untuk didefinisikan oleh pemiliknya sendiri. Ia ditempatkan dalam kerangka moralitas yang diproduksi oleh tafsir

patriarkal atas kitab suci. Perempuan yang tidak mematuhi standar busana syar'i akan diberi label sebagai tidak salehah, tidak pantas, atau bahkan sumber kerusakan moral masyarakat.

Namun, dominasi keagamaan terhadap tubuh perempuan tidak selalu diartikulasikan secara eksplisit. Dalam banyak kasus, kontrol tubuh dibungkus dengan narasi perlindungan dan kehormatan. Seperti yang diungkap oleh Mahmood (2005) dalam bukunya *Politics of Piety*, perempuan Muslim dalam gerakan revivalis Mesir justru secara aktif menginternalisasi praktik disiplin tubuh sebagai bentuk pengabdian religius. Ini menimbulkan pertanyaan penting dalam kajian feminisme pascastuktural: apakah kepatuhan perempuan terhadap aturan tubuh keagamaan merupakan bentuk penindasan atau ekspresi agensi? Mahmood menolak dikotomi simplistik antara dominasi dan emansipasi. Baginya, subjek religius terbentuk melalui disiplin diri, bukan semata-mata karena paksaan eksternal.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan Mahmood dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian perempuan dengan sadar memilih berpakaian tertutup, menolak tampil di publik, atau membatasi relasi sosial sebagai bentuk ibadah. Namun, penting dicatat bahwa dalam ruang sosial yang tidak setara, pilihan semacam itu sering kali dibentuk oleh tekanan kolektif yang dibungkus melalui dalil keagamaan. Seperti dikemukakan dalam artikel Jurnal Muwazah dan KM (Komunikologi), batas antara pilihan personal dan kontrol sosial menjadi kabur ketika masyarakat menganggap tubuh perempuan sebagai milik umum yang sah untuk diatur dengan dalih agama.

Selain itu, agama tidak bekerja sendiri dalam mendisiplinkan tubuh. Ia sering berkelindan dengan sistem patriarki dan norma adat. Artikel dari jurnal Resiprokal dan hasil penelitian digilib UNS menyatakan bahwa banyak komunitas lokal di Indonesia menjadikan ajaran agama sebagai dasar untuk melanggengkan kontrol terhadap tubuh perempuan, khususnya terkait peran domestik, batas mobilitas, dan larangan terhadap tubuh perempuan lajang yang hidup mandiri. Dalam banyak kasus, batas-batas tubuh perempuan ditentukan bukan oleh keinginan individu, tetapi oleh nilai-nilai kolektif yang diklaim sebagai "ajaran agama" tanpa ruang dialog.

Namun, tidak semua perempuan menerima secara pasif kontrol semacam itu. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul gerakan feminisme Islam di Indonesia yang berusaha membongkar tafsir keagamaan yang bias gender. Organisasi seperti Rahima, Fahmina, dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) melakukan upaya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan untuk mengembalikan otonomi perempuan atas tubuhnya. Studi Nafi, M. Z. (2018) dan Musdah Mulia (2005) menunjukkan bahwa dalam teks Islam sendiri terdapat banyak ruang bagi pembacaan yang lebih adil terhadap tubuh perempuan. Misalnya, perintah menutup aurat tidak selalu harus diinterpretasikan sebagai kewajiban menutupi tubuh secara ketat, melainkan sebagai etika kesopanan yang bersifat kontekstual dan dinamis.

Feminisme Islam juga menolak pandangan bahwa tubuh perempuan adalah sumber fitnah. Sebaliknya, mereka melihat tubuh perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang bermartabat dan berhak dikelola oleh pemiliknya sendiri. Dalam diskursus ini, tubuh perempuan menjadi locus teologis dan politis yang sama-sama penting. Tubuh tidak hanya berbicara tentang identitas biologis atau sosial, tetapi juga spiritualitas dan kemanusiaan.

Maka dari itu, kontrol keagamaan terhadap tubuh perempuan harus dilihat secara kritis, bukan semata-mata sebagai ekspresi iman, tetapi juga sebagai bagian dari konstruksi kekuasaan yang dapat menghasilkan penindasan sistemik. Penolakan terhadap tubuh perempuan yang berbeda dari standar normatif agama sering kali menciptakan alienasi, rasa bersalah, bahkan kekerasan simbolik dalam bentuk persekusi, pengucilan, dan pembungkaman suara. Di sinilah pentingnya

menghadirkan wacana keagamaan alternatif yang membuka ruang bagi keanekaragaman ekspresi tubuh perempuan, baik dalam konteks busana, mobilitas, maupun afeksi.

3. Representasi Media dan Komodifikasi Tubuh

Di era digital dan kapitalisme lanjut, media memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik tentang tubuh, termasuk tubuh perempuan. Representasi tubuh perempuan dalam media bukanlah hasil refleksi realitas yang objektif, melainkan konstruksi sosial yang sarat kepentingan ideologis dan ekonomi. Tubuh perempuan direproduksi oleh media melalui logika visual yang menekankan aspek estetika, sensualitas, dan ketundukan pada standar kecantikan yang sempit. Dalam konteks ini, media tidak hanya menampilkan tubuh perempuan, tetapi juga mengatur bagaimana tubuh itu harus hadir, dilihat, dan dimaknai di ruang publik.

Kajian yang dilakukan oleh Paramita (2017) dalam jurnal *Komunikologi Esa Unggul* menunjukkan bahwa media televisi di Indonesia—khususnya dalam sinetron dan iklan kosmetik—secara konsisten mempromosikan citra perempuan ideal sebagai berkulit putih, bertubuh langsing, muda, dan feminin. Standar ini diinternalisasi oleh masyarakat sebagai norma kecantikan yang sah. Perempuan yang tidak sesuai dengan citra tersebut secara simbolik didorong ke pinggiran; tubuh mereka dianggap tidak layak tampil di ruang publik. Representasi ini menciptakan hirarki kecantikan yang sangat eksklusif dan bersifat diskriminatif, terutama terhadap perempuan dari kelompok minoritas etnis atau kelas sosial bawah.

Fenomena ini tidak terlepas dari logika pasar. Dalam industri media yang dikendalikan oleh kepentingan kapitalistik, tubuh perempuan dijadikan komoditas untuk menjual produk, gaya hidup, dan citra kebahagiaan. Dalam iklan-iklan kecantikan dan fashion, tubuh perempuan difragmentasi: wajah yang mulus, rambut yang lurus, kulit yang putih, dan kaki yang jenjang menjadi elemen yang “dijual” secara terpisah maupun bersama-sama. Tubuh perempuan kehilangan keutuhannya sebagai subjek yang hidup dan sadar; ia direduksi menjadi objek visual semata. Seperti diungkap oleh Naomi Wolf dalam *The Beauty Myth* (1991), standar kecantikan dalam budaya media modern adalah bentuk pengendalian sosial baru yang membuat perempuan sibuk mengejar kesempurnaan fisik agar lupa pada potensi intelektual dan politiknya.

Salah satu manifestasi ekstrem dari logika ini adalah apa yang disebut *self-objectification*, yaitu kecenderungan perempuan untuk melihat dan menilai tubuh mereka dari sudut pandang eksternal. Studi dari jurnal *JIWP* dan *SALINGKA* menunjukkan bahwa remaja perempuan mengalami tekanan psikososial yang tinggi akibat paparan intens terhadap media sosial seperti Instagram dan TikTok, di mana tubuh dipamerkan, dinilai, dan dibandingkan secara terus-menerus. Banyak dari mereka mengalami kecemasan tubuh (*body anxiety*), gangguan makan, dan rendahnya harga diri karena merasa tidak sesuai dengan standar tubuh ideal yang dipromosikan media.

Namun, dalam konteks ini, tubuh perempuan bukan sekadar korban. Sebagian perempuan menggunakan media sosial sebagai ruang artikulasi diri dan resistensi terhadap standar dominan. Gerakan *body positivity* dan kampanye seperti #NoFilter atau #MyBodyMyRules di platform seperti Instagram dan YouTube telah menjadi sarana bagi perempuan untuk mendefinisikan tubuhnya sendiri di luar logika konsumerisme dan patriarki. Mereka memposting foto tubuh dengan stretch marks, kulit gelap, atau bentuk tubuh non-ideal sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap diskriminasi tubuh (*body shaming*). Fenomena ini sejalan dengan

gagasan Judith Butler tentang tubuh sebagai konstruksi yang bisa dinegosiasikan dan dipolitisasi kembali oleh subjeknya sendiri (Butler, 1990).

Studi dari jurnal *Empower* dan *Humaniora* juga menunjukkan bahwa perempuan dalam budaya urban Indonesia mulai melakukan reposisi terhadap tubuh melalui karya seni, vlog, hingga satire digital. Tubuh tidak lagi hanya dipertontonkan, tetapi juga digunakan untuk menyampaikan kritik sosial terhadap konsumerisme, diskriminasi gender, dan moralitas ganda. Dalam hal ini, media menjadi medan kontestasi: di satu sisi mereproduksi kuasa patriarkal, di sisi lain membuka kemungkinan resistensi simbolik.

Komodifikasi tubuh juga tampak dalam industri hiburan dan periklanan. Perempuan sering kali diposisikan sebagai “aksesoris visual” dalam konten musik, acara olahraga, dan sinetron. Perempuan dalam peran utama pun sering direduksi menjadi tokoh pasif yang menunggu cinta, diselamatkan, atau dihargai hanya karena kecantikannya. Ini memperkuat mitos bahwa nilai perempuan bergantung pada penampilan, bukan pada kapasitas intelektual, spiritual, atau moral. Dalam analisis yang lebih dalam, hal ini bukan sekadar strategi pemasaran, tetapi juga mekanisme ideologis yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat secara struktural.

Namun demikian, perkembangan teknologi digital juga memberikan ruang baru bagi perempuan untuk melawan komodifikasi tersebut. Banyak kreator konten perempuan yang memproduksi narasi alternatif tentang tubuh: perempuan yang kuat, bertubuh besar, berkulit gelap, atau berusia lanjut diberi ruang representasi dalam platform mandiri. Media digital memungkinkan perempuan menjadi produsen makna, bukan sekadar konsumen atau objek. Ini membuka peluang baru bagi redefinisi tubuh secara lebih demokratis dan pluralistik.

Dalam kesimpulan sementara, media memiliki dua wajah dalam relasi dengan tubuh perempuan: sebagai agen hegemonik yang mengendalikan dan mengobjektifikasi tubuh, dan sebagai ruang potensi resistensi di mana tubuh perempuan diklaim kembali sebagai wilayah otonomi. Oleh karena itu, penting bagi studi-studi media untuk tidak hanya fokus pada isi konten, tetapi juga pada relasi kuasa, aktor ekonomi, dan dampak psikososial dari representasi tubuh. Dengan pendekatan kritis dan interdisipliner, tubuh perempuan dapat dibebaskan dari jerat komodifikasi menuju afirmasi tubuh yang utuh dan bermakna.

4. Budaya Lokal, Adat, dan Tubuh Perempuan

Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, adat dan budaya lokal memainkan peran penting dalam membentuk identitas kolektif dan struktur sosial. Namun, dalam konteks ini, tubuh perempuan sering kali menjadi objek regulasi yang merefleksikan nilai-nilai patriarkal yang tertanam dalam tradisi. Adat istiadat tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi juga menetapkan norma-norma yang mengontrol ekspresi tubuh perempuan, baik dalam hal berpakaian, mobilitas, maupun peran sosial.

Penelitian oleh Rodiyah (2018) menyoroti bahwa dalam berbagai tradisi lokal di Indonesia, perempuan memiliki peran sentral dalam pelestarian budaya, seperti dalam upacara adat dan penyampaian nilai-nilai kultural kepada generasi muda. Namun, peran ini sering kali dibatasi oleh norma-norma yang menempatkan perempuan dalam ranah domestik dan subordinat terhadap laki-laki. Meskipun perempuan aktif dalam menjaga tradisi, mereka jarang mendapatkan pengakuan setara dalam struktur sosial yang didominasi oleh nilai-nilai patriarkal.

Studi oleh Maharani (2009) mengenai masyarakat Baduy menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal, namun tetap terikat oleh aturan adat yang

membatasi kebebasan mereka. Perempuan Baduy, misalnya, diharapkan untuk mematuhi aturan berpakaian tertentu dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan peran gender tradisional. Hal ini mencerminkan bagaimana adat dapat memperkuat kontrol sosial terhadap tubuh perempuan, meskipun perempuan tersebut berperan aktif dalam pelestarian budaya.

Di Sulawesi Selatan, penelitian oleh Haftafilia et al. (2022) mengungkapkan bahwa perempuan berperan dalam pelestarian budaya lokal melalui partisipasi dalam seni tradisional dan kegiatan budaya lainnya. Namun, mereka menghadapi hambatan seperti keterbatasan waktu, aksesibilitas, dan kurangnya pengakuan terhadap kontribusi mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan berperan dalam menjaga budaya, struktur sosial yang ada masih membatasi ruang gerak dan pengakuan terhadap peran mereka.

Fenomena serupa juga terlihat dalam tradisi Merariq di Lombok, di mana perempuan menjadi subjek dalam praktik pernikahan adat yang melibatkan simbolisme penculikan (Fairiza, 2024). Meskipun praktik ini dilakukan dengan persetujuan keluarga, interpretasi dan pelaksanaannya dapat memperkuat kontrol sosial terhadap perempuan dan membatasi otonomi mereka dalam memilih pasangan hidup. Hal ini mencerminkan bagaimana adat dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol tubuh perempuan dalam konteks sosial tertentu.

Namun, penting untuk dicatat bahwa perempuan tidak selalu menjadi korban pasif dalam struktur adat yang patriarkal. Banyak perempuan yang secara aktif menegosiasikan peran mereka dalam masyarakat adat, mencari ruang untuk mengekspresikan diri dan memperjuangkan hak-hak mereka. Upaya ini mencerminkan resistensi terhadap norma-norma yang membatasi dan menunjukkan bahwa perempuan memiliki agensi dalam menghadapi struktur sosial yang tidak setara.

Dalam konteks ini, penting bagi studi-studi budaya untuk tidak hanya melihat peran perempuan dalam pelestarian adat, tetapi juga memahami dinamika kekuasaan yang mempengaruhi posisi mereka dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang kritis dan interdisipliner, kita dapat mengidentifikasi cara-cara di mana perempuan dapat diberdayakan dalam konteks budaya lokal, serta mengembangkan strategi untuk menciptakan struktur sosial yang lebih adil dan inklusif.

5. Ekofeminisme: Tubuh Perempuan dan Eksploitasi Kapitalisme

Penting pula dicermati bagaimana wacana tubuh perempuan dalam beberapa artikel (Susilo & Kodir, 2023) dikaitkan dengan pendekatan ekofeminisme. Ekofeminisme menyatakan bahwa tubuh perempuan dan alam sama-sama dijadikan objek eksploitasi oleh sistem kapitalisme dan patriarki. Tubuh perempuan dijadikan sebagai “tanah subur” yang terus dieksploitasi: melalui kerja reproduksi yang tidak dibayar, kerja domestik, serta industri tubuh seperti fashion dan kecantikan.

Dalam ekofeminisme, kontrol terhadap tubuh perempuan menjadi representasi dari kerusakan struktural yang lebih luas: ekologi yang rusak, tanah adat yang diambil paksa, hingga industrialisasi yang menindas. Dengan demikian, perjuangan tubuh perempuan sejajar dengan perjuangan lingkungan—keduanya bertujuan membongkar struktur kekuasaan hegemonik yang eksploitatif.

6. Tubuh Sebagai Medium Politik dan Resistensi

Di tengah kepingan kontrol sosial, muncul pula bentuk-bentuk perlawanan yang bersifat simbolik maupun konkret. Artikel dari Jurnal Humaniora dan Empower mencatat bagaimana seni

tubuh (body art), puisi perempuan, dan aksi feminis menggunakan tubuh sebagai simbol perlawanan terhadap represi kultural dan institusional.

Tubuh perempuan dalam pertunjukan teater feminis, misalnya, digunakan untuk mengungkapkan trauma kekerasan seksual, kritik terhadap norma moralitas, serta upaya pengambilan kembali otonomi atas ruang privat. Aksi diam, gerakan lambat, pembungkaman lisan, dan ekspresi tubuh dalam seni menjadi bahasa politik alternatif ketika institusi formal tak memberikan ruang advokasi.

Lebih jauh, perlawanan juga bersifat epistemik. Perempuan akademisi, aktivis, dan mahasiswa menulis ulang narasi tentang tubuh perempuan melalui jurnal, blog, dan media sosial. Narasi ini menggeser posisi perempuan dari objek menjadi subjek: dari tubuh yang diawasi menjadi tubuh yang bicara.

IV. Kesimpulan dan Saran

Politik tubuh perempuan di Indonesia merupakan medan kompleks yang mempertemukan berbagai bentuk kekuasaan—negara, agama, adat, dan media—dalam mengatur, mengawasi, dan mendisiplinkan tubuh perempuan. Tubuh perempuan tidak hanya menjadi objek biologis, tetapi juga simbol moral, spiritual, dan ideologis yang sarat makna. Kontrol terhadap tubuh perempuan berlangsung melalui kebijakan negara seperti tes keperawanan, regulasi berpakaian, hingga representasi media yang mengobjektifikasi tubuh perempuan.

Namun demikian, perempuan tidak sepenuhnya tunduk pada kekuasaan tersebut. Mereka menunjukkan berbagai bentuk resistensi, baik melalui media sosial, seni, budaya populer, hingga reinterpretasi teks keagamaan. Pendekatan ekofeminisme juga memperluas pemahaman bahwa eksploitasi tubuh perempuan sejajar dengan eksploitasi terhadap alam oleh sistem kapitalisme dan patriarki.

Dengan demikian, tubuh perempuan adalah arena politik yang dinamis—tempat berlangsungnya pertarungan antara dominasi dan kebebasan, antara kontrol dan agensi. Mengakui tubuh perempuan sebagai subjek politik yang aktif adalah langkah penting menuju keadilan gender yang lebih substansial.

V. Saran

1. Bagi Akademisi dan Peneliti: Diperlukan kajian interdisipliner yang lebih mendalam mengenai politik tubuh perempuan, terutama yang mengaitkan aspek budaya lokal, agama, dan media digital. Penelitian lapangan yang melibatkan suara perempuan dari berbagai latar belakang juga penting untuk memperkaya perspektif.
2. Bagi Pembuat Kebijakan: Perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan publik yang secara langsung atau tidak langsung mengontrol tubuh perempuan. Kebijakan harus berbasis pada prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender, bukan pada norma moral yang bias gender.
3. Bagi Aktivis dan Organisasi Perempuan: Strategi pemberdayaan perempuan perlu diarahkan pada penguatan agensi tubuh, termasuk melalui pendidikan kritis, kampanye media, dan ruang ekspresi seni. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

4. Bagi Masyarakat Umum: Penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa tubuh perempuan bukan milik publik yang sah untuk diatur, tetapi merupakan wilayah otonomi pribadi yang harus dihormati. Pendidikan gender sejak dini dapat menjadi langkah awal untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Azizah, L. (2021). *Self-love dan media sosial: Representasi tubuh perempuan dalam budaya digital*. Jurnal Empower, 5(2), 112–125. <http://www.syekhnhurjati.ac.id/jurnal/index.php/empower/article/view/3501>
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.
- Fairiza, A. (2024). *Merariq dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi dan Dinamika Sosial dalam Ritual Penculikan*. Jurnal Analisa Sosiologi.
- Fatonah, S. (2022). *Tubuh Perempuan dalam Perspektif Islam dan Realitas Sosial*. Jurnal Muwazah, 14(1), 56–72. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/Muwazah/article/view/9014>
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
- Haftafilia, M. I., Dewi, S., & Rahman, A. (2022). *Analisis Peran Perempuan dalam Pelestarian Budaya Lokal di Kabupaten Wajo*. Jurnal Socia Logica, 1(1), 1–10.
- Kusumawati, S. (2013). *Tubuh sebagai Medium Kritik: Kajian Performativitas Tubuh Perempuan dalam Seni*. Jurnal Humaniora, 25(1), 34–46. <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/1008>
- Maharani, S. D. (2009). *Perempuan dalam Kearifan Lokal Suku Baduy*. Jurnal Filsafat, 19(3), 199–213.
- Mahmood, S. (2005). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Mulia, M. (2005). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia.
- Nafi, M. Z. (2018). *Menjadi Islam, Menjadi Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Ningsih, E. (2022). *Representasi Tubuh Perempuan dalam Media dan Budaya Konsumsi*. Jurnal SALINGKA, 7(2), 88–98. <https://salingka.ppjbsip.com/index.php/SALINGKA/article/download/128/73>

- Paramita, R. (2017). *Perempuan dalam Sinetron: Representasi Tubuh dan Gender di Televisi Indonesia*. *Komunikologi*, 3(1), 15–27. <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/4>
- Rahmah, N. (2020). *Politik Moralitas dan Tubuh Perempuan dalam Kebijakan Publik*. *JIWP*, 6(3), 134–146. <http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/6101>
- Rodiyah. (2018). *Peran Perempuan dalam Melestarikan Berbagai Tradisi Lokal*. *Tsaqofah dan Tarikh Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 3(1), 65–71.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Susilo, D., & Kodir, A. (2023). *Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawanan*. *Politik: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 51–70. <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol1/iss2/5>
- UNRAM. (2023). *Politik Tubuh dan Kekuasaan Adat terhadap Perempuan di NTB*. *Resiprokal*, 4(1), 44–59. <https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/article/view/286>
- Wolf, N. (1991). *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*. New York: Harper Perennial.
- Zulfa, F. (2019). *Tes Keperawanan dan Biopolitik Tubuh Perempuan dalam Rekrutmen Polisi*. Repository Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/114942/>